

BAB III PROFIL INSTANSI

3.1. Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Koperasi dan UKM merupakan suatu lembaga yang bertugas membantu Gubernur menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. hal ini sudah ada sesuai dengan peraturan gubernur No. 6 Tahun 2002. Dengan tujuan utama adalah melayani masyarakat yang berada pada daerah tersebut sehingga masyarakat dapat menjangkau Dinas Koperasi dan mudah untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM.

3.1.1 Organisasi Instansi

Untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung produk UMKM dan untuk membantu proses pemasaran produk, maka Dinas Koperasi UKM telah menajamkan kembali Tujuan, Visi, dan Misi nya.

Intansi Pemerintahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Kita Gerakan Ketahanan Ekonomi Rakyat Bangka Belitung melalui Gerbang Emas KUMKM yang Tangguh, Mandiri Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

2. Misi

- a. Menciptakan dan Mengembangkan Lapangan Usaha (*Pro-Business Expand*)
- b. Mendorong dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (*Pro-Growth*)

- c. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja (*Pro-Job*)
- d. Meningkatkan Pendapatan Perkapita dan Kesejahteraan Masyarakat (*Pro-Income/Kapita*)
- e. Menurunkan Tingkat Kemiskinan (*Pro-Poor*)

Mengembangkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi SKPD Andalan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teknologi digital mendorong perubahan dan akan mengembangkan lapangan usaha. Digitalisasi menciptakan platform yang sempurna untuk inovasi. Salah satu E-Commerce yang akan membawa produk umkm lebih luas dalam proses pemasaran dan Dinas Koperasi dan UKM mencapai visinya adalah *Kita Gerakan Ketahanan Ekonomi Rakyat Bangka Belitung melalui Gerbang Emas KUMKM yang Tangguh, Mandiri Berdaya Saing dan Berkelanjutan*. Dinas Koperasi dan UKM percaya bahwa pegawai dan masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Sebanyak 183.796 UMKM adalah aset saya yang paling berharga sebagai bekal untuk menggapai cita-cita dalam mewujudkan ekonomi yang sejahtera di Kepulauan Bangka Belitung.

3.1.2 Jumlah Karyawan

PNS (Pegawai Negeri Sipil) = 50

Terdiri dari Dinas dan Balatkop.

PHL (Pegawai Harian Lepas) / Honorer = 40

Terdiri dari Dinas, Penjaga kantor, Balatkop, dan PLUT.

32 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yang terpisah yaitu pulau bangka dan pulau belitung akan tetapi memiliki satu provinsi yang sama yaitu provinsi kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2000, Bumi serumpun sebalai ini resmi menjadi wilayah otonom. Penetapan ini sudah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217). Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dibentuk juga kelengkapan perangkat pemerintahan seperti sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, sekretariat provinsi, dinas provinsi dan lembaga teknis provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi kepulauan Bangka Belitung saat ini memiliki jumlah penduduk lebih kurang 1.455.678 jiwa. Jumlah tersebut masih belum pasti dikarenakan hampir setiap bulan jumlah penduduk akan terus meningkat karena terjadi imigrasi penduduk dari pulau yang masuk ke Provinsi kepulauan Bangka Belitung baik itu hanya merantau untuk bekerja maupun berpindah domisili kependudukan.

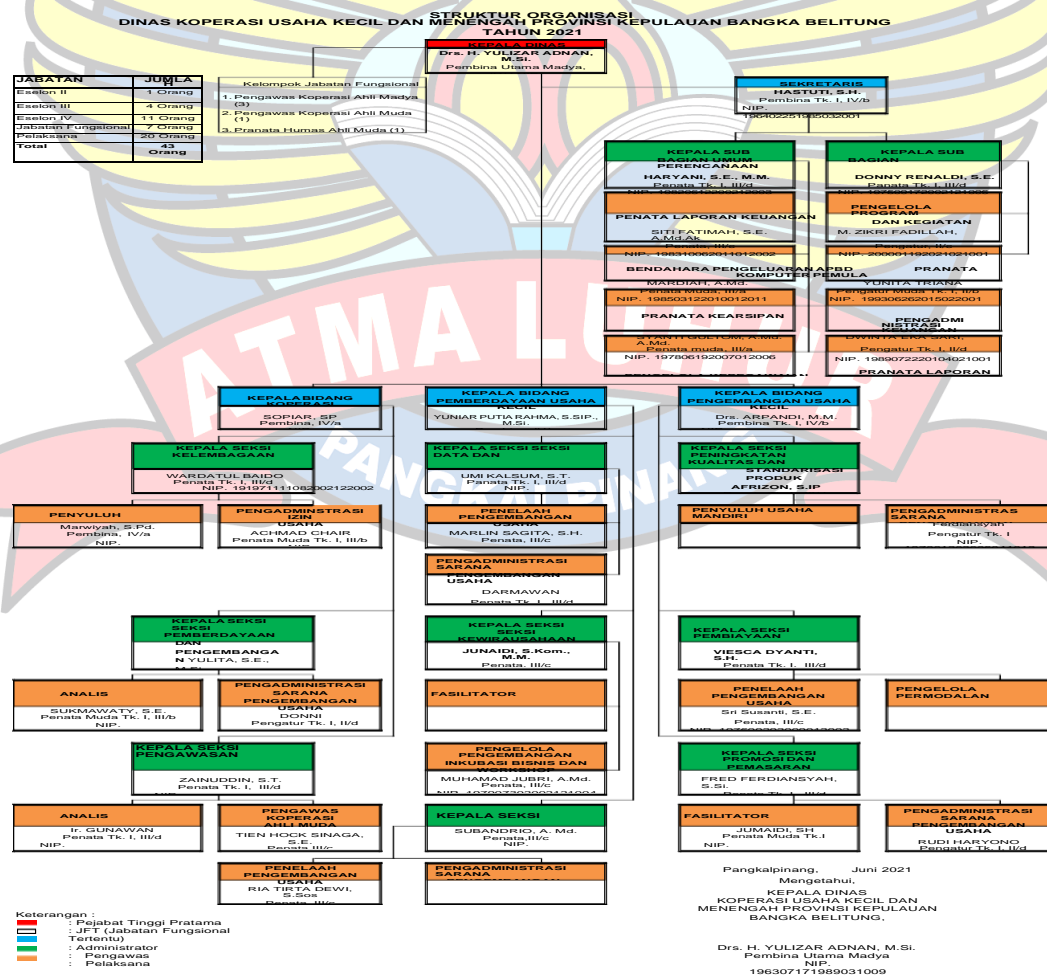
Dari sekian banyak perangkat di Provinsi kepulauan Bangka Belitung salah satunya adalah Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, usaha Kecil dan menengah dan sebagai instansi teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah harus memiliki indikator pembangunan yang diperlukan selain untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi sasaran pembangunan juga untuk kebutuhan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dinas koperasi usaha kecil pertama kali dikepalai oleh bapak Usman Soleh S.E, M.M yang dulunya tempat lokasi pertamanya di Gabek di rumah biasa yang masih tergabung dengan Dinas perindustrian dan perdagangan yang masih dalam satu kesatuan dan sudah beberapa kali pindah tempat dari kantor di Gabek pindah ketempat Dinas perindustrian dan perdagangan kemudian ke tempat kantor atuan Pamong Peraja di depan kantor Gubernur kemudian baru di Dinas Koperasi memiliki nama kantor Dinas Koperasi, dan sudah 4 kali pergantian Kepala Dinas didalam jabatannya dan ditahun ini bulan Juli barulah digantikan dengan pak Yulizar Adnan, M.Si yang mana beliau menjabat sebagai kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan data yang saya dapatkan diWebsite Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah jumlah Koperasi yang terdapat di Bangka Belitung 3 tahun

terakhir yaitu, ditahun 2018 terdapat 681 koperasi yang aktif dari jumlah total 981 koperasi di Bangka Belitung, ditahun 2019 terdapat 654 koperasi aktif dari jumlah total 1.049 koperasi di Bangka Belitung, dan ditahun 2020 terdapat 657 koperai aktif dari jumlah total 1.053 koperasi di Bangka Belitung, dan ditahun 2021 terdapat 334 koperasi aktif maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi yang terdapat di Bangka Belitung mengalami penurunan pertiap tahunnya. Bangka Belitung berjumlah 334 koperasi, dari yang aktif ditahun 2020 berjumlah 657 koperasi. Akan tetapi UMKM di Bangka Belitung di tahun di tahun 2019 terdapat 180.000 ribu UMKM di Bangka Belitung, di tahun 2020 terdapat 183,796 ribu UMKM di Bangka Belitung.

33 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Adapun urutan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola di atas saya peserta magang dibagi sesuai dengan Bidang yang telah di tentukan, Pada Bidang Pemberdayaan ini saya melakukan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan pada umumnya. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan penjelasan mengenai keseluruhan tugas dan pekerjaan dari Bidang Pemberdayaan.

3.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan

Tugas :

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.
2. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pemberdayaan UKM.
3. Penyelenggaraan verifikasi data UKM.
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemetaan potensi kewirausahaan.
5. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penciptaan iklim kewirausahaan.
6. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penumbuhkembangan wirausaha dan inkubasi wirausaha.
7. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kemitraan.
8. Penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan pendataan dan penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan kemitraan.
9. Penyelenggaraan evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendataan dan penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan kemitraan.
10. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
11. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.